

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Angelo Emanuel, 2022, *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, Fianosa Publishing, Atambua Barat.

Bawaslu, 2024, “Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”, Jakarta, hlm. 3.

Bawaslu, 2020, “Desain Program Pemantauan Pemilu, Jakarta

Deden Koswara, Ahmad Fikri dan Erfa Redhani, 2020, *Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Edward Aspinal, Mada Sukmajati, 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Penerbit PolGov, Yogyakarta.

International IDEA, 2011, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (DuaBahasa, Penerj.), Indonesia Printer, Jakarta.

Irvan Mawardi, Muhamad Jufri dan Moh Nizar, 2021, *Keadilan Pemilu: Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

Khairul Fahmi dan Ratna Dewi Pettalolo, 2020, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Jakarta.

M. Afifudin, 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis Dari Dalam*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Mohamad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media,

Pasuruan.

Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranda Media, Jakarta

Sheyla Nichlatus Sovia, Et. Al. 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Constitution of the Republic of the Philippines.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

COMELEC resolution Number 9386, “*Rules of Procedures in the Investigation and Prosecution of Election Offense Cases in the Commission on Elections, Philippines.*”

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Jurnal

Abdul Waid dan Muhammad Achid, 2022, *“Penguatan Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana dalam Pilkada (Sebuah Ius Constituendum)”*, As Syar’e Jurnal Syariah dan hukum, Vol. 1, No. 1.

Achmad Surya, 2023, *“Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara”*, Harmonization, Vol. 1, No. 1.

Ainul Badri mengutip Soerjono Soekanto, 2021, *“Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 2, No. 2.

Anggy Dwi dan Mega Dewi, 2025, *“Peran Bawaslu Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2, No. 1.*

Ariyanto, 2014. *“Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota”*, Legal Pluralism, Vol. 4, No. 2.

Christy Messy, Marlien dan Efvendi Sondakh, 2022, *“Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea”*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 3.

Darampalo dan Nasrullah, 2023, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”* Journal Law And Justice Vol. 1, No. 1.

Dian Ayu dan Achmad Akmaluddin, 2022, *Analisis Peran dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur dalam Pilkada Tahun 2020*”, Jurnal Sosmaniora, Vol. 1, No. 2.

Diyah Nur dan Miranda Inko Sherly, 2025, *“Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis”*, Tumoutou Social Science Journal, Vol. 2, No. 1.

Erwin Prima, 2016, *“Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*, Fiat Justitia, Vol. 10, No. 3.

Fauzia Sholikhati dan Ridham Priskap, 2024, *“Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”*, Hangoluan Law Review, Vol. 3, No. 2.

I Made Agus, Ruslan Haerani dan Abdul Gani, 2024, “*Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram*”, Unizar Recht Journal, Vol. 3, No. 4.

Junaidi, 2010, “*Problema Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 1.

Kamal Fahmi, 2024, “*Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice)*”, Jurnal Litigasi, Vol. 25, No. 2.

M. Djalil, Jamil dan Kholilur Rahman, 2022, “*Karakteristik Tindak Pidana Pemilu dan Opsi Pembagiannya*”, Jurnal Belo, Vol. 8, No. 2.

Motulo, Phileo Hazelya, 2020, “*Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*”, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4.

Muhtadi, Burhanuddin, 2019 “*Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru.*” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1.

Riandy Indra, Deizen dan Victor Kasenda, 2024, “*Efektivitas Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 12, No. 4.

Sukimin dan Subaidah Ratna, 2023 “*Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.

Syafruddin dan Siti Hasanah, 2022, “*Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*”, Journal of Government and Politics, Vol. 4, No. 2.

Syamsul Wathoni dan Luluk Indarinul, 2024, “*Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah*”, *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 1.

Taufa Perdana, Moh. Alfaris dan Anik Iftitah, 2020, “*Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1.

Topo Santoso, 2009, “*Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 4.

Wendy Melfa, 2013, “*Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada*,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2.

Y. Azhar, Et. Al., 2025, “*Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*”, *At-Tanwir Law Review*, Vol. 5, No. 2.

D. Skripsi/Tesis

Julpiando. P, 2023, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Money Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Studi Di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

E. Internet

Febyana Siagian, “*Mengenal Indeks Kerawanan Pemilu 2024*”, <https://www.tempo.co/pemilu/mengenal-indeks-kerawanan-pemilu-2024-174572>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2025 Jam 05.27

Fitriyah, 2011, “*Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*”,

<https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2025, Jam 04.10.

Hukum Online, “*Praktik Politik Uang dalam Pilkada Lebih Masif dari Pilpres*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-politik-uang-dalam-pilkada-lebih-masif-dari-pilpres-hol13099/?page=1>, dikunjungi pada tanggal 19 September 2025 Jam 02.51.

Radian Syam, “*Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam RUU Pemilu*”, <https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2025 jam 03.46.

Ramadhan, “*Daftar Temuan Bawaslu RI terkait Pelanggaran di Pilkada 2024*”, *Tribun Tangerang*, <https://tangerang.tribunnews.com/2024/11/27/daftar-temuan-bawaslu-ri-terkait-pelanggaran-di-pilkada-2024>, dikunjungi pada 14 Juni tanggal 2025 Jam 07.00.

Robi Ardianto dan Reyn Gloria, “*Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*”, <https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2025 jam 03.42.

Sasmito Madrim, “*Bawaslu Petakan Lima Provinsi Rawan Politik Uang*”, <https://www.voaindonesia.com/a/bawaslu-petakan-lima-provinsi-rawan-politik-uang-/7223824.html> dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2025 Jam 21.16.

Sudastika, “*Pj Walikota Cirebon: Sentra Gakkumdu Grada Terdepan Penegakan Hukum Pemilu*”, <https://ciayumajakuning.id/2024/09/02/pj-wali-kota-cirebon->

sentra-gakkumdu-garda-terdepan-penegakan-hukum-pemilu/, dikunjungi pada tanggal 17 Juni, Jam 5.56.

UIN Sunan Gunung Djati, “*Membuktikan Kecurangan Pemilu*”,
<https://uinsgd.ac.id/membuktikan-kecurangan-pemilu/>, dikunjungi pada tanggal 7 November 2025 Jam 01.22.

F. Putusan

Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010.

G. Laporan Instansi/Lembaga

Bawaslu, 2024, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024”, Lampung.

-----, 2024, “Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024”, Jawa Barat.

-----, 2024, “Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024”, Sumatera Barat.

-----, 2024, “Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024”, Banten.

-----, 2024, “Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024”, Jambi